

# SEKALI LAGI, KITA ADALAH BANGSA YANG KUKUH

Oleh:  
**Ginandjar Kartasasmita**  
**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas**

Disampaikan pada Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) - ICMI  
Jakarta, 23 Desember 1997

*Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

## **Pendahuluan**

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang mengundang saya untuk berbicara pada Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) tahun 1997 yang terhormat ini. Saya telah menerima beberapa kali undangan dalam Silaknas ICMI, dan setiap permintaan kepada saya itu ada isu-isu yang dipilih dan dianggap penting oleh ICMI untuk saya kemukakan sebagai bahan diskusi. Silaknas kali ini, mungkin karena hampir "rutin" dan saya selalu bersedia untuk ICMI, membebaskan saya untuk memilih sendiri isu yang saya anggap penting untuk dikemukakan dalam Silaknas ini.

Saya percaya Panitia Pelaksana Silaknas bukan kehabisan ide untuk mengangkat isu, tetapi barangkali mereka ingin lebih mengetahui apa yang menjadi pemikiran saya saat ini ketika bangsa dan negara kita sedang diuji dalam terpaan tantangan ekonomi, dan juga tantangan-tantangan lain ketika kita sedang bersiap menyusun GBHN 1998 serta mensukseskan Sidang Umum MPR 1998.

Tentu saja banyak isu dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik yang sedang berkembang dan berlangsung dalam kita menyongsong SU MPR 1998, tetapi bagi saya, sakh satunya yang penting, dan menurut saya masih sesuai dengan tema Silaknas kali ini: *Peningkatan Ahlak Bangsa Sebagai Dasar Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Serta Kesenambungan Pembangunan Nasional*, adalah mengenai Bangsa Yang Kukuh.

Saya awali judul makalah ini dengan kata "sekali lagi" di depan topik utama "bangsa yang kukuh", karena masih saja sebagian dari kita ada yang cepat goyah dan menjadi tidak rasional dalam pikiran dan tindakannya ketika bangsa kita sedang diuji dan diterpa oleh tantangan-tantangan. Saya ingin mengajak kepada mereka itu, bahwa tidak ada kamus keletihan (*fatigue*) bagi bangsa yang kukuh. Bangsa kita telah diuji sejak tahun 1945, dan tentu juga sebelumnya yang dirintis oleh para *syuhada* kita dalam perjuangan mendirikan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita telah menghadapi ujian dan kesulitan yang lebih berat dari tantangan ekonomi kini, dan *Alhamdulillah* kita terus mampu tegak dan berjalan maju. Betul, kita tak perlu menepuk dada, kita perlu berpikir dan bekerja lebih keras, serta merapatkan barisan dari segala potensi kita. Insya Allah bangsa kita tetap dan selalu kukuh, sebagai bangsa yang maju, sejahtera, mandiri dan *Rahmatan lil alamin*.

## **1. Bangsa Yang Kukuh: Fondasinya Pancasila**

Bangsa Indonesia kukuh karena fondasinya adalah Pancasila. Dalam konsep kita, pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila. Pembangunan ekonomi kita pun harus berlandaskan Pancasila, sebagai dasar, tujuan dan pedoman dalam penyelenggaraannya. Dengan dasar pemikiran ini, maka sistem ekonomi yang ingin kita bangun adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila.

Saya mengetahui bahwa banyak pakar telah mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan ekonomi berdasarkan Pancasila. Tampaknya selama ini belum tercapai konsensus ke arah satu pengertian. Bahkan banyak yang mencoba menghindari menggunakan istilah itu. Saya bisa memahami kalau selama ini ada kekhawatiran dalam merumuskan ekonomi berdasarkan Pancasila, oleh karena memang kondisi ekonomi kita pada waktu yang lalu masih begitu tertinggalnya, sehingga berbicara mengenai idealisme yang demikian akan dirasakan bertentangan dengan kenyataan dalam kehidupan yang sesungguhnya.

Namun, dewasa ini saya berpendapat bahwa sudah saatnya kita menentukan sikap dan membulatkan niat untuk membangun ekonomi menuju arah sesuai cita-cita para pendiri Republik ini.

Pembangunan selama ini telah memberikan hasil yang cukup nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi nasional, sehingga memberikan modal dan kesempatan kepada kita untuk memikirkan lebih jauh idealisme pembangunan dan menjabarkannya dalam konsep-konsep yang operasional, yang secara bertahap membawa kita ke tujuan itu.

Jelas tidak akan mudah bagi kita untuk mengembangkan konsep ini, karena sebagai konsep ekonomi dan konsep pembangunan harus memenuhi berbagai syarat, di samping idealisme atau pandangan-pandangan yang normatif, harus juga memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, sehingga ada asas-asas objektif dan rasional yang dapat dikembangkan. Namun, kita juga tidak berhenti mengupayakannya semata-mata karena belum ada atau belum banyak literatur yang secara mendalam mengkaji konsep ini. Justru kita harus memulainya dan mengembangkan konsensus ke arah itu.

Sebelum melanjutkan, kiranya saya perlu mendudukkan dulu apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dimengerti sebagai kumpulan dari institusi yang terintegrasi dan berfungsi serta beroperasi sebagai suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan (ekonomi) tertentu. Institusi di sini diartikan secara luas sebagai kumpulan dari norma-norma, peraturan, atau cara berfikir. Adanya berbagai institusi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dengan memberikan bentuk atau struktur dasar sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian institusi ini juga termasuk institusi ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, kekayaan, uang, serikat pekerja, dan lain-lain.

Dalam suatu perekonomian, setidaknya terdapat empat jenis keputusan yang harus diambil setiap waktu. Keputusan-keputusan tersebut adalah yang berkaitan dengan apa yang akan diproduksi, berapa banyak produksi, bagaimana cara memproduksinya, dan bagaimana distribusi produk tersebut. Bagaimana keputusan tersebut diambil tergantung kepada sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat atau negara tersebut.

Berdasarkan mekanisme koordinasi pengambilan keputusan, kita mengenal dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi pasar dan ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi pasar, keputusan-keputusan seperti tersebut di atas diambil oleh pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar yang juga disebut mekanisme harga. Dengan kata lain, pengambilan keputusan ekonomi sangat terdesentralisasi pada pelaku-pelaku ekonomi melalui mekanisme harga yang terbentuk dalam struktur pasar yang berkembang. Pada sistem ekonomi komando, keputusan diambil berdasarkan suatu komando atau rencana yang terperinci mengenai apa yang harus diproduksi, berapa banyak, bagaimana memproduksinya, dan lain-lain. Keputusan diambil melalui *administrative decision* dan alokasi sumber daya ekonomi dilakukan melalui *administrative allocation* atau pencatatan berdasarkan rencana ekonomi nasional yang tersepekat.

Di samping pengambilan keputusan seperti tersebut di atas, ciri lain dari suatu perekonomian adalah tentang pemilikan aset produktif. Dalam sistem ekonomi kapitalis, aset-aset produktif dimiliki oleh individu atau swasta, sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, aset produktif dikuasai oleh masyarakat yang diwakili oleh pemerintah.

Masing-masing sistem tersebut mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Oleh karenanya, dalam dunia nyata yang kita kenal adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kita, menganut paham ekonomi pasar, atau menurut istilah yang digunakan oleh Ikatan Sarjana

Ekonomi Indonesia (ISEI) ekonomi pasar terkendali (tahun 1990) atau ekonomi pasar terkelola (tahun 1996).

Apabila pengertian itu yang akan kita anut, karena datang dari pakar-pakarnya, maka kata kuncinya adalah terkelola. Menurut hemat saya yang dimaksud dengan sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi pasar yang terkelola dan kendali pengelolaannya adalah nilai-nilai Pancasila. Dengan perkataan lain ekonomi kita harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, inilah yang mengantar kita sebagai bangsa yang kukuh.

Atas dasar itu maka ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis, karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral dan etika bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak. Akhlak bangsa inilah yang harus menjadi landasan penyelenggaraan perekonomian nasional. Maka sangatlah tepat tema yang dipilih dalam Silaknas ini, karena akhlak bangsa inilah esensi utama yang memperkuat tegaknya bangsa kita.

Ekonomi yang didasari oleh Pancasila, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Dengan dasar-dasar moral dan kemanusiaan seperti di atas ekonomi yang berfondasi pada Pancasila meskipun tidak menghalangi motivasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan, namun tidak mengenal predator-predator ekonomi, yang satu memangsa yang lain. Dan, dengan memandang pembangunan ekonomi nasional sebagai suatu sistem, satu komponen sistem ekonomi yang didasari Pancasila akan memperkuat komponen lainnya. Lemah pada salah satu komponen sistem ekonominya berarti lemah keseluruhan sistem ekonominya.

Ekonomi yang berfondasi pada Pancasila berakar di bumi Indonesia. Meskipun ekonomi dunia sudah menyatu, pasar sudah menjadi global, namun ekonomi Indonesia tetap diabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan kesatuan ekonomi sebagai penjabaran wawasan nusantara di bidang ekonomi. Globalisasi kegiatan ekonomi tidak menyebabkan internasionalisasi kepentingan ekonomi nasional kita. Kepentingan ekonomi kita tetap diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ekonomi yang dijiwai oleh Pancasila dengan demikian berwawasan kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik meskipun kegiatannya sudah mengglobal.

Sila keempat dalam Pancasila menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia. Di bidang ekonomi, ekonomi yang berlandaskan Pancasila dikelola dalam sebuah sistem demokratis yang dalam Undang-undang Dasar secara eksplisit disebut demokrasi ekonomi.

Nilai-nilai dasar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan kita, untuk mengembangkan perekonomian Indonesia, diarahkan pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan (*distributive justice*) bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Setelah mencoba mengupayakan pengertian-pengertian sistem ekonomi yang bagaimana yang ingin kita bangun pada tataran filosofis, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengoperasionalkannya dalam penyelenggaraan perekonomian nasional kita.

Sesungguhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, beberapa petunjuk ke arah itu telah ada dalam berbagai pasalnya. Pasal 23 beserta penjelasannya, 27 ayat (2), pasal 33 beserta penjelasannya, dan pasal 34 memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana konsep ekonomi harus dikembangkan. Bahkan dalam pasal 33 ada penjelasan yang cukup rinci mengenai apa yang dikehendaki oleh Undang-undang Dasar, mengenai bagaimana ekonomi kita harus dikelola dan dikembangkan. Tantangan bagi kita sekarang adalah bagaimana secara tepat kita menjabarkannya dalam konsep-konsep pembangunan untuk nantinya dituangkan dalam

rencana-rencana pembangunan nasional.

Dalam upaya itu jelas tidak ada jalan yang lurus dan mulus. Kadang-kadang kita harus berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, bahkan kadang-kadang harus mundur dulu sedikit kemudian maju lagi. Yang penting kita harus menjaga bahwa arahnya tetap konsisten, betapa pun dari saat ke saat kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan situasi. Betapa pun juga kita telah menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, yang terus berkembang mengikuti dinamik masyarakat. Namun, nilai-nilai dasarnya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dengan mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima tahun MPR memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu serta menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari. Petunjuk-petunjuk itu dituangkan dalam GBHN.

Upaya untuk menjabarkan amanat konstitusi sesuai dengan perkembangan situasi telah dilakukan sejak PJP I, GBHN demi GBHN, sampai GBHN 1993. Sekarang kita sedang dalam persiapan menyusun bahan-bahan untuk GBHN 1998.

Dalam tataran operasional, yang sangat diperlukan adalah konsep mengenai bagaimana peran para pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi yang dijiwai Pancasila, dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di masa depan. Dua di antaranya sangat menonjol, yaitu : (a) menghadapi ekonomi global dengan meningkatkan daya saing, dan (b) membangun semua potensi ekonomi di dalam negeri agar tumbuh kuat dan dapat turut menyumbang kepada kekuatan ekonomi nasional.

Pelaku ekonomi dimaksudkan terdiri dari masyarakat sebagai produsen barang dan jasa atau disebut juga sebagai dunia usaha, masyarakat sebagai konsumen dan pemerintah yang mengatur bekerjanya berbagai institusi ekonomi nasional.

Dalam sistem ekonomi kita dikenal adanya tiga bentuk dunia usaha atau bangun usaha, yaitu usaha negara, koperasi, dan usaha swasta. Bagaimana masing-masing berperan, memang merupakan topik pembahasan dan perdebatan yang telah banyak dilakukan sejak kita kembali ke Undang-undang Dasar (UUD) 1945 di tahun 1959. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menafsirkan amanat UUD 1945 dalam pasal 33. Bahkan ada di antaranya yang kemudian kita anggap tidak sejalan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 itu, seperti sistem ekonomi terpimpin.

Dalam masa Orde Baru usaha untuk mewujudkan amanat UUD itu telah dilanjutkan. Saya bisa mengambil sebuah contoh. Pada tahun 1990, ISEI dalam kongres ke XI telah mengupayakan untuk menjabarkan bagaimana peran para pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi yang ingin kita tegakkan.

Menurut ISEI, di dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dapat bergerak di dalam semua bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakikatnya masing-masing. Dalam konsep itu, usaha negara berperan sebagai: (a) perintis di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta; (b) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara; (c) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; (d) imbalan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta; (e) pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi, dan (f) penunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara. Selanjutnya koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan sesuai dengan hakikatnya sebagai kesatuan ekonomi yang berwatak sosial. Sedangkan usaha swasta diberi peranan yang sebesar-besarnya di dalam bidang-bidang di mana persaingan dan kerja sama berdasarkan motivasi memperoleh laba memberikan hasil terbaik bagi masyarakat diukur dengan jenis, jumlah, mutu dan harga barang dan jasa yang dapat disediakan.

Dengan mengambil pandangan-pandangan ISEI itu, saya ingin menunjukkan betapa para pakar kita telah berupaya untuk menjabarkan lebih lanjut pemikiran-pemikiran dasar kita itu.

Berbagai usaha tersebut harus kita lanjutkan. Kita perlu lebih memperdalam lagi rumusan tentang peran negara, koperasi dan usaha swasta dalam sistem ekonomi yang dilandasi oleh Pancasila tersebut.

Mengingat masyarakat kita terus berkembang dan kita hidup sebagai bagian dari masyarakat dunia yang terus berkembang pula, konsep-konsep itu haruslah tidak kaku dan statis, tetapi luwes dan lentur, serta memungkinkan berkembang sesuai dengan dinamika perubahan yang terus menerus terjadi. Namun, hal-hal yang mendasar seperti nilai-nilai utama yang tadi telah saya kemukakan tidak perlu bahkan tidak seyogyanya berubah.

Salah satu tantangan kita sekarang adalah bagaimana mengembangkan pelaku-pelaku ekonomi nasional tersebut untuk senantiasa meningkatkan daya saingnya baik di tingkat pasar domestik dan pasar internasional. Dan, lebih lanjut, bagaimana upaya-upaya peningkatan daya saing tersebut dibangun di atas landasan moral dan etika yang sesuai dengan sistem nilai pembangunan penyelenggaraan ekonomi nasional kita. Oleh karenanya, peningkatan daya saing tidak cukup hanya dibangun di atas landasan peningkatan efisiensi dan produktivitas masyarakat semata. Melainkan, harus pula didasarkan atas suatu mekanisme pengembangan dan peningkatan yang didasarkan atas moral dan etik yang berkembang dari sistem nilai Pancasila.

Konsumen adalah juga pelaku ekonomi. Oleh karena itu, pada waktu kita berbicara mengenai pengembangan jatidiri para pelaku ekonomi, kita tidak hanya berbicara mengenai produsen tetapi juga konsumen. Kita menghendaki agar perilaku konsumen Indonesia mampu memperkuat upaya kita untuk membangun wujud masyarakat yang kita harapkan, yaitu yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

Untuk itu, *pertama*, konsumen diharapkan memberi penghargaan dan mengutamakan penggunaan produk hasil bangsanya sendiri. Hal ini sering dikatakan sebagai cermin nasionalisme baru. Sikap mendahulukan penggunaan produksi dalam negeri, tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional, karena bersangkutan dengan pilihan yang bebas dan bukan karena paksaan atau dibatasinya pilihan atau hak untuk memilih. Sikap serupa itu justru akan menjamin pertumbuhan kemampuan produksi nasional secara berkesinambungan. Pada gilirannya akan mendorong proses kemandirian bangsa.

*Kedua*, konsumen Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Pola konsumsi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat sekitar, jelas tidak sesuai dengan semangat tenggang rasa dan saling menghormati keyakinan, dan dapat menimbulkan suasana permusuhan dan pertentangan, sehingga melemahkan keutuhan bangsa.

*Ketiga*, konsumen Indonesia harus memperhatikan pula taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Pola konsumsi yang berlebihan, yang mewah di atas kewajaran, apalagi di tengah masyarakat yang miskin, akan menyebabkan kecemburuan sosial dan mempertajam kesenjangan. Akibatnya mudah sekali terjadi konflik-konflik sosial. Konflik-konflik sosial lebih mudah muncul ke permukaan oleh karena tidak adanya rasa solidaritas, sebagai akibat menyoloknya perbedaan gaya hidup.

## **2. Bangsa Yang Kukuh: Masyarakatnya Yang Berdaya**

Bangsa yang kukuh adalah masyarakatnya yang berdaya. Oleh karena itu upaya pemberdayaan masyarakat yang tidak henti-hentinya adalah sendi kita menjadi bangsa yang kukuh. Kata *power* dalam *empowerment* diartikan “daya” sehingga *empowerment* diartikan sebagai pemberdayaan. Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan *power* dengan pembagian kesejahteraan. Keadaan keterbelakangan seperti diutarakan di atas terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber *power*. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power disenfranchisement* atau *dispowerment*, yakni peniadaan *power* pada sebagian

besar masyarakat. Akibatnya, maka lapisan masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap aset produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang “memiliki *power*”. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi mengakibatkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran itu berputar terus.

Oleh karena itu pemberdayaan bertujuan dua arah. *Pertama*, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. *Kedua*, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh, dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi seseorang. Kepastian ekonomi adalah esensial agar masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan untuk menguasai *power*.

Dengan berbagai pandangan itu dikembangkan pendekatan pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat.

Dasar pandangnya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain, memberdayakannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*".

Konsep ini lebih luas dari pada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang disebut pembangunan alternatif atau *alternative development*, yang menghendaki demokrasi yang melekat, pertumbuhan ekonomi yang tepat, keseimbangan jender, dan keadilan antargenerasi.

Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena keduanya tidak harus diasumsikan sebagai tidak serasi (*incompatible*) atau bersifat antitesis (*antithetical*). Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game*" dan "*trade off*". Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pola pertumbuhan sama pentingnya dengan laju pertumbuhan itu sendiri. Yang dicari, adalah pertumbuhan yang tepat, yakni bukan yang vertikal menghasilkan Atetesan ke bawah@, seperti yang terbukti tidak berhasil, melainkan yang bersifat horisontal, yakni yang berbasis luas, menciptakan kesempatan kerja, dan tidak terkotak-kotak.

Dalam kerangka sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat (pelaku ekonomi) berkembang. Di sini premisnya adalah bahwa setiap pelaku ekonomi memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Premis ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa masyarakat tidak pernah berada dalam kondisi potensialnya (*eclipse*). Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya dan tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai potensi untuk berkembang. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya atau kapasitas tersebut dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dan perilaku akan potensi yang dimilikinya.

*Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (pelaku ekonomi). Dalam rangka ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih positif disamping penciptaan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang meliputi penyediaan berbagai sarana dan prasarana serta pembukaan dan pengembangan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat pelaku ekonomi menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi pelaku

ekonomi yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak senantiasa dapat menyentuh pelaku ekonomi yang kurang berdaya.

*Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, pemerintah harus mampu mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangan-berdayaan menghadapi yang kuat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pendekatan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan hendaknya bersifat terarah kepada *the intended beneficiaries*. Pendekatan ini secara populer disebut sebagai pemihakan. Proses ini sangat diperlukan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila karena sistem ini dibangun atas premis bahwa lemah pada salah satu komponen akan melemahkan keseluruhan sistem ekonomi. Oleh karena itu, proses pemberdayaan yang terarah juga sangat dipentingkan dalam membangun sistem ekonomi yang didasarkan oleh Pancasila. Oleh karena sifatnya yang terarah, proses pemberdayaan dikembangkan atas dasar kondisi riil dan kebutuhan riil pelaku ekonomi untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya untuk berkembang.

Lebih lanjut, proses pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan kelompok sehingga mampu menjamin berkembangnya etika dan moral kekeluargaan serta mampu menghimpun daya secara bersama. Di samping itu, di dalam politik ekonomi, pengembangan kapasitas dan kemampuan pelaku ekonomi tidak terlepas dari proses politik untuk mendapatkan akses dan *power*. Oleh karenanya, diperlukan suatu mekanisme kelembagaan yang mampu menjamin bahwa pelaku ekonomi yang kurang berdaya tetap akan memperoleh akses dan *power* untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan ekonominya. Untuk ini, diperlukan pengorganisasian masyarakat atau organisasi ekonomi untuk pelaku ekonomi yang kurang berdaya. Namun demikian, dalam rangka pembangunan bangsa secara bertahap, kita dituntut untuk mengembangkan suatu format politik yang menjamin berkembangnya setiap organisasi ekonomi sesuai dengan falsafah politik Pancasila.

Pemberdayaan, dalam realitanya, bukan hanya konsep ekonomi semata. Ia juga merupakan konsep sosial, budaya, dan politik. Ia merupakan konsep yang menyeluruh yang menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karenanya, proses pemberdayaan menuntut tidak hanya peningkatan kapasitas dan kemampuan ekonomi tetapi juga sikap para pelaku ekonomi. Pengembangan moral dan etika usaha juga merupakan bagian dari proses pemberdayaan dalam sistem ekonomi yang didasari Pancasila.

### **3. Bangsa Yang Kukuh: Pemerintahnya Yang Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani**

Bangsa yang kukuh adalah pemerintahnya yang memprakarsai secara proaktif untuk upaya pemberdayaan masyarakat, dan mendukungnya tanpa menggurui atau campur tangan yang berlebihan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat pada sistem ekonomi yang disukmakan dan dijiwai oleh Pancasila, menuntut peran pemerintah yang sejalan dengan nilai-nilai dasar penyelenggaraan sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila karena tidak semua aspek perekonomian nasional dapat diswastakan. Dalam mekanisme pasar yang dikembangkan dalam sistem ekonomi berlandaskan Pancasila, pemerintah sebagai *public body* mempunyai peran yang besar khususnya untuk mengembangkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak. Untuk itu, birokrasi yang merupakan pengejawantahan mekanisme operasional dalam mewujudkan kepentingan masyarakat: (1) harus mampu membangun partisipasi masyarakat; (2) hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kepada yang kurang berdaya (netral saja tidak cukup); (3) peran aparaturnegara harus sudah bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberi menjadi memberdayakan; dan (4) mengembangkan keterbukaan dan kebertanggung-jawaban.

Kendati di era perdagangan bebas dan globalisasi kini peran pemerintah di seluruh dunia

semakin dipertanyakan perannya dalam kehidupan bangsa dan masyarakat, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional jelaslah tidak kecil. Saya berpendapat bahwa pemerintah harus mengemban tiga peran sekaligus. *Pertama*, dalam upaya pemerataan dan membangun keadilan pemerintah harus berada di depan, *Ing Ngarso Sung Tulodo*. Upaya mengentaskan penduduk dari kemiskinan, pemerataan pembangunan antardaerah, menghilangkan kesenjangan, haruslah menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah harus memeloporinya. Dalam upaya membangun rasa adil dan menciptakan rasa aman dan rasa tenteram dalam masyarakat, pemerintah harus berada di depan, menunjukkan jalan dan memberi keteladanan. Pemerintah harus memelopori terbentuknya institusi sosial dan ekonomi yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan berperannya secara optimal pelaku-pelaku ekonomi masyarakat.

*Kedua*, dalam berbagai upaya pembangunan pemerintah harus bekerja bersama masyarakat dan menggerakkan kegiatan pembangunan oleh masyarakat. Pemerintah harus *Ing Madyo Mangun Karso*. Dalam berbagai usaha produksi di mana masyarakat belum sepenuhnya mampu tanpa ditopang oleh pemerintah, pemerintah harus mendukungnya. Misalnya, membangun prasarana untuk mendorong kegiatan investasi masyarakat. Pemerintah membangun jalan, tenaga listrik, atau irigasi untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Bahkan mungkin masih harus mengelola prasarana tersebut agar dapat terus berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

*Ketiga*, dalam hal masyarakat sendiri sudah sepenuhnya dapat berperan, maka peran pemerintah adalah *Tut Wuri Handayani*. Itulah yang dimaksudkan pada waktu kita mengatakan bahwa dalam konsep pembangunan kita masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Apabila hambatan-hambatan yang disebabkan baik oleh peraturan dari pemerintah sendiri ataupun hambatan lainnya dapat dihindari, sudah akan sangat menolong. Apalagi kalau ditopang oleh peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menunjang.

## Penutup

Demikianlah, sekilas uraian mengenai bahasan yang kita ingini dalam menuju bangsa yang kukuh. Kita senantiasa melandasi pikiran, tindakan, upaya dan keyakinan kita bahwa bangsa yang kukuh bagi bangsa kita hanya dapat dicapai melalui Pancasila. Pada rekan-rekan cendekiawan di ICMI, saya mengajak, kita tidak perlu merasa menjadi *steril* bila membahas masalah masyarakat atau salah satu aspek dari kehidupan bangsa, termasuk ekonominya, yang disangkutken dengan Pancasila. Kita tidak perlu merasa terkurung seolah berbicara suatu aspek yang "ditempel" dengan Pancasila menjadi pembicaraan *final-ideal* tidak perlu dibicarakan lagi. Karena Pancasila sebagai ideologi terbuka ia dinamis dan sumber pikiran yang tiada habisnya ketika kita berbicara mengenai kebangsaan dan kenegaraan.

Bangsa yang kukuh berdasarkan Pancasila, adalah yang mampu memberdayakan masyarakatnya. Pemberdayaan bukanlah hanya konsep pembangunan ekonomi, melainkan juga konsep sosial, budaya, dan politik. Pemberdayaan masyarakat menyangkut bukan hanya kesejahteraan dalam ukuran material, tetapi juga berkenaan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan dambaan setiap orang untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kemajuan dan kemandirian, sebagai sasaran-sasaran utama pembangunan, bukan hanya ukuran kemampuan ekonomi melainkan juga menunjukkan sikap seseorang atau suatu masyarakat. Dan kalau sudah masalah sikap maka ia adalah masalah budaya. Oleh karena itu, konsep pembangunan kita sebenarnya menetapkan perilaku ekonomi sebagai perilaku sosial budaya yang harus didasari oleh kebudayaan kita.

Salah satu upaya penting dalam strategi memperkuat kekuatan bangsa adalah peranan pemerintah yang secara proaktif memberi keteladanan, mendorong prakarsa, serta mendukung upaya-upaya kita dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah pendidikan, dan melalui pendidikan, termasuk pendidikan dalam pengembangan iman dan taqwa serta penyerapan ilmu pengetahuan kita membangun bangsa yang berakhlak. Akan tetapi, ini tentunya adalah persoalan

lain lagi, yang memerlukan pembahasan tersendiri. Dengan catatan ini saya ingin mengakhiri pembahasan kita pada pagi hari ini.